

## **INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa) DESA TONGKE-TONGKE KECAMATAN SINJAI TIMUR**

**Sirajuddin, Syamsuddin, Abd Wahid**

Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia, No Kontak 082299490668

Email Korespondensi: [sirajuddinhalib07@gmail.com](mailto:sirajuddinhalib07@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam bentuk-bentuk inovasi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Tongke-Tongke dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena secara kontekstual dan holistik, terutama berkaitan dengan proses, aktor, dan dinamika kebijakan di tingkat desa yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Teknik Pengumpulan data yaitu Wawancara mendalam (*in-depth interview*), Observasi partisipatif dan Dokumentasi. Prosedur analisis mengikuti tahapan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014) yaitu; Reduksi data merupakan Penyaringan dan pemilihan data yang relevan sesuai fokus penelitian; Penyajian data adalah Penyusunan data dalam bentuk narasi, matriks, atau kategori tematik serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa berdasarkan inovasi kebijakan, Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur yang dulunya di tahun 2022 dan 2023 Pendapatan Asli Desa (PADesa) tidak ada sama sekali, dengan adanya kebijakan tersebut Pendapatan Asli Desa Tongke-Tongke sudah ada sebesar Rp. 881.000, Meskipun relatif rendah tetapi masih punya peluang untuk meningkat karena beberapa inovasi kebijakan tersebut sifatnya berkelanjutan. Meskipun demikian, program ini masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu mendapat perhatian, seperti keterbatasan modal operasional lanjutan, risiko teknis dalam pelaksanaan, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. Tantangan tersebut menjadi faktor penghambat yang harus diantisipasi untuk menghindari penurunan kinerja di masa mendatang. Ke depan, program ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih luas dengan memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan kapasitas produksi, serta melakukan inovasi pada metode pengelolaan.

**Kata kunci:** Inovasi, Kebijakan, Pemerintah Desa

**Abstract:** This research aims to describe and understand in depth the forms of policy innovations implemented by the Tongke-Tongke Village Government in increasing Village Original Income (PAD), as well as analyze the supporting and inhibiting factors for the implementation of these policies. The qualitative approach was chosen because it is able to explore phenomena contextually and holistically, especially related to processes, actors, and policy dynamics at the village level that cannot be quantitatively measured. Data collection techniques are in-depth interviews, participatory observation and documentation. The analysis procedure follows the stages developed by Miles and Huberman (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014), namely; Data reduction is the screening and selection of relevant data according to the focus of the research; Data presentation is the preparation of data in the form of narratives, matrices, or thematic categories as well as the drawing of conclusions and verification. The results of the study found that based on policy innovations, Tongke-Tongke Village, East Sinjai District, which used to be in 2022 and 2023 the Village Original Revenue (PADesa) did not exist at all, with this policy the Original Income of Tongke-Tongke Village already existed at Rp. 881,000, although relatively low but still has the opportunity to increase because some policy innovations are said to be sustainable. However, this program still has several shortcomings that need attention, such as limited advanced operational capital, technical risks in implementation, and the need to increase the capacity of the human resources involved. These challenges are an inhibiting factor that must be anticipated to avoid a decline in performance in the future. In the future, this program has the potential to be developed more widely by expanding the marketing network, increasing production capacity, and innovating management methods.

**Keywords:** Innovation, Policy, Village Government

**Article History :**

Received 25-07-2025; Revised 27-08-2025; Accepted 30-09-2025

## PENDAHULUAN

Di era otonomi daerah, desa memiliki peran yang semakin strategis sebagai ujung tombak pembangunan. Otonomi desa memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal (Mardiasmo, 2018). Salah satu aspek penting dalam mewujudkan kemandirian desa adalah kemampuan desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). PAD merupakan sumber pendanaan yang berasal dari desa itu sendiri, seperti hasil usaha desa, hasil aset, swadaya masyarakat, dan lain-lain, yang dikelola secara langsung oleh pemerintah desa (Kementerian Dalam Negeri, 2014). Penguatan PAD sangat penting agar desa tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer dari pusat atau daerah seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), yang sifatnya cenderung stimulus dan tidak dapat diandalkan secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Tetapi hingga kini sebagian besar desa masih menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi. Hal ini tidak hanya menunjukkan lemahnya kemandirian desa secara ekonomi, tetapi juga menjadi tantangan bagi desa dalam mengembangkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, inovasi kebijakan menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi pilihan. Pemerintah desa perlu melakukan terobosan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mampu menggali serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, guna meningkatkan PAD secara berkelanjutan (Sari & Wijayanti, 2021).

Inovasi kebijakan dalam konteks desa mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan aset desa secara profesional, pengembangan destinasi wisata berbasis kearifan lokal, penguatan UMKM, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan promosi produk unggulan desa (Prabowo & Putra, 2020). Misalnya, beberapa desa di Indonesia telah berhasil meningkatkan PAD melalui pengelolaan BUMDes dalam sektor perdagangan, penginapan, pengolahan hasil pertanian, dan layanan publik. Strategi seperti ini menunjukkan bahwa jika digerakkan dengan pendekatan yang tepat, desa bisa mandiri secara fiskal. Namun, keberhasilan inovasi tersebut sangat bergantung pada beberapa faktor penting, seperti kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, komitmen kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, serta dukungan regulasi dan pendampingan dari pemerintah daerah (Wahyudi, 2022). Tidak sedikit desa yang mengalami kegagalan dalam pengelolaan BUMDes atau aset karena lemahnya tata kelola, rendahnya literasi bisnis, dan tidak adanya evaluasi berbasis data. Selain itu, faktor regulatif juga turut berpengaruh. Meskipun pemerintah telah memberikan payung hukum bagi desa untuk melakukan pengelolaan keuangan dan usaha secara mandiri, implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh tumpang tindih regulasi, birokrasi yang kaku, serta minimnya pelatihan bagi aparat desa (Suharto, 2015). Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan sistematis yang tidak hanya mendorong inovasi kebijakan, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem pengawasan desa.

Berdasarkan kajian-kajian teoritis diatas berbeda halnya dengan yang terjadi di Desa Tongke-Tongke bahwa di tahun 2022 dan 2023 Pendapatan Asli Desa (PADesa) tersebut

tidak ada sama sekali. Sementara di tahun 2024 baru ada pendapatan sebesar Rp. 881.000. Dari data tersebut maka menarik untuk diteliti karena selain daripada dua tahun tidak ada pemasukan dan di tahun 2024 mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan dan terbilang masih rendah. Desa tongke-Tongke terletak dipesisir laut yang memungkinkan untuk digarap menjadi salah satu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terbaik dan berkelanjutan dengan sistem manajemen keuangan yang transparan, hasil retribusi dari transaksi di TPI, sewa lapak, hingga jasa pengemasan dan distribusi, selain daripada itu, desa tongke-tongke juga bisa membangun tambatan perahu kemudian memungut retribusi melalui Peraturan Desa agar masuk ke kas desa dan menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PAD). Kehadiran TPI yang dikelola secara profesional juga dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor logistik, pengolahan, hingga pariwisata lokal. Potensi yang lain yang dimiliki oleh Desa Tongke-Tongke adalah peternak sapi dan ayam petelur karena memiliki Kawasan pertanian yang luas.

Adapun Inovasi Kepala Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai adalah Pembangunan Tambatan Perahu 4 titik di 4 dusun kemudian di buatkan perda retribusi, memfasilitasi beberapa ekor sapi kepada Masyarakat dengan system bagi hasil, pembuatan kontener sampah untuk Masyarakat kemudian memungut retribusi per Kepala Keluarga, Retribusi di Tempat Pelelangan Ikan dan pemeliharaan ayam petelur oleh BUMDES. Berdasarkan dengan potensi dan inovasi tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk implementasi inovasi kebijakan yang telah dirancang oleh Pemerintah Desa Tongke-Tongke, menilai dampaknya terhadap peningkatan PAD, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Dengan memahami pola-pola kebijakan yang berhasil dan tantangan yang dihadapi, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model kebijakan desa yang lebih kreatif, adaptif, dan berkelanjutan dalam rangka memperkuat otonomi dan kemandirian desa..

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam bentuk-bentuk inovasi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Tongke-Tongke dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut (Moleong, 2017; Sugiyono, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena secara kontekstual dan holistik, terutama berkaitan dengan proses, aktor, dan dinamika kebijakan di tingkat desa yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell, 2014). Penelitian ini berfokus pada pemahaman makna dan interpretasi dari pelaku kebijakan desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap inovasi yang dijalankan. Penelitian ini di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* (bertujuan), yaitu pada desa-desa yang telah mengimplementasikan inovasi kebijakan yang berdampak terhadap peningkatan PAD, berdasarkan data dari pemerintah daerah atau publikasi resmi (Sari & Wijayanti, 2021; Prabowo & Putra, 2020). Teknik Pengumpulan Data yaitu Wawancara mendalam (*in-depth interview*), Observasi partisipatif dan Dokumentasi sedangkan Teknik Analisis Data, Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian.

Prosedur analisis mengikuti tahapan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014), yaitu; Reduksi data merupakan Penyaringan dan pemilihan data yang relevan sesuai fokus penelitian; Penyajian data adalah Penyusunan data dalam bentuk narasi, matriks, atau kategori tematik serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu Menyimpulkan temuan dan melakukan validasi melalui triangulasi data dari berbagai sumber (Sugiyono, 2018; Creswell, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan dengan hasil penelitian tentang Inovasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur terdapat sebagai inovasi Pembangunan yang dilakukan diantaranya;

### **A. Kebijakan Pembangunan Tambatan Perahu**

Rendahnya Pendapatan Asli Desa (PADesa) Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai timur sehingga Bapak Sirajuddin sebagai Kepala Desa merumuskan salah satu inovasi kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, Pemerintah Desa mengambil langkah strategis melalui pembangunan tambatan perahu. Berdasarkan penelitian bahwa tambatan perahu yang dibangun oleh Pemerintah Desa Tongke-Tongke berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Desa Nomor: 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan tambatan perahu di tiga titik yaitu Tambatan Perahu Dusun Cempae, Tambatan Perahu Dusun Babana dan Tambatan Perahu Dusun Maroanging. Fasilitas ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan tempat sandar yang aman dan tertata bagi perahu milik nelayan maupun masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penataan wilayah perairan desa yang selama ini belum dikelola secara optimal.

Selain daripada itu Tambatan Perahu Sebagai bentuk pengelolaan berkelanjutan, Pemerintah Desa Tongke-Tongke menetapkan pungutan retribusi penggunaan tambatan perahu secara resmi. Pungutan ini bersifat legal dan transparan, serta didasarkan pada Peraturan Desa yang disusun bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tongke-Tongke Nomor: 03 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan pungutan desa yang disepakati dalam musyawarah desa.

Berdasarkan peraturan desa bentuk retribusi pada penggunaan tambatan perahu tersebut adalah retribusi bongkar muat perahu penongkol. Pada Bab 2 pasal 2 menjelaskan bahwa tujuan retribusi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Adapun besaran pungutan biaya retribusi perahu berdasarkan peraturan desa yaitu sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per perahu.

## Pembangunan tambatan perahu pada 3 Dusun di Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur



**Gambar 1. Tambatan Perahu Dusun Maroangng**



**Gambar 2. Tambatan Perahu Dusun Baccara**



**Gambar 3. Tambatan Perahu Dusun Babana**

Pembangunan tambatan perahu tersebut bukan hanya menjadi sarana fisik, tetapi juga meningkatkan ekonomi desa yang berkelanjutan. Penerapan retribusi secara tertib dan transparan akan memperkuat kemandirian masyarakat desa, serta menjadi contoh nyata pengelolaan potensi 480asya yang produktif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

### **B. Kebijakan Pengelolaan Sampah**

Penerapan kebijakan pengelolaan sampah sebagai upaya menciptakan peluang dan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, Pemerintah Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur melakukan inovasi melalui penerapan **retribusi sampah**

**berbasis layanan.** Penerapan sistem ini diawali dengan pendataan seluruh rumah tangga dan unit usaha di desa, untuk mengklasifikasikan kebutuhan layanan masing-masing. Selanjutnya, pemerintah desa menetapkan peraturan desa (Perdes) yang mengatur tarif retribusi, jadwal pengangkutan, dan tata kelola keuangannya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan retribusi pengelolaan sampah berbasis layanan di Desa Tongke-Tongke diawali dengan pengadaan dan penentuan lokasi penempatan kontener sampah. Penentuan lokasi tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tongke-Tongke Nomor: 05 Tahun 2023 tentang penentuan lokasi Pembangunan kontener sampah yang akan dilakukan pungutan retribusi sampah yang terletak 3 (tiga) titik yaitu depan Masjid Lailatul Qadri Dusun Cepae, samping rumah Kepala Desa Dusun Babana dan TPI dusun Maroanging. Dengan penempatan lokasi kontener sampah dengan berbasis layanan ini, pengelolaan sampah desa menjadi lebih terarah, partisipatif, dan sekaligus berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli desa (PADesa). Meski dalam pelaksanaannya akan dihadapkan pada tantangan seperti resistensi warga atau kendala teknis, upaya edukasi, pelibatan warga dalam perencanaan, dan transparansi anggaran akan menjadi kunci keberhasilan program ini.

Setelah ditentukan penempatan lokasi kontener sampah, tahun 2025 Pemerintah Desa mengeluarkan Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 02 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah dilakukan pungutan retribusi berdasarkan peraturan desa Bab VI tentang Retribusi persampahan pasal 33 yang menyatakan bahwa ada beberapa tempat pungutan retribusi persampahan diantaranya retribusi sampah untuk rumah tangga perbulan, retribusi sampah untuk pelaku usaha per bulan, retribusi sampah untuk Lembaga Pendidikan, retribusi sampah untuk hajatan per kegiatan. Karena ini sifatnya berkelanjutan maka untuk sementara yang baru terealisasi Perdesnya adalah untuk rumah tangga. Adapun kategori tarif rumah tangga adalah kategori kecil sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah), kategori menengah Rp. 15.000,-(Lima Belas Ribu Rupiah), di antar langsung Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan dijemput langsung oleh petugas Rp. 15.000,-(Lima Belas Ribu Rupiah).

Kontener Sampah dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur



**Gambar 4. Kontener Depan Masjid Lailatul Qadri Dusun Cepae**



**Gambar 5. Kontener TPI Dusun Maroanging**



**Gambar 6. Samping Rumah Kepala Desa Dusun Babana**

Sebagai bentuk penguatan dan pengembangan, program Kepala Desa Tongke-Tongke ini memiliki rencana lanjutan yang tertuang dalam Peraturan Desa berfokus pada peningkatan kapasitas dan manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah. Beberapa langkah

lanjutan yang akan dilakukan antara lain: Pengembangan sentra daur ulang, Kemitraan dengan industry dan UMKM, Peningkatan kapasitas SDM, Pemanfaatan teknologi digital dan Skema insentif berkelanjutan. Dengan adanya program lanjutan ini, pengelolaan sampah tidak hanya berhenti pada tahap pengangkutan dan pembuangan, tetapi juga berkembang menjadi kegiatan produktif yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

### C. Penyertaan Modal Ayam Petelur

Peningkatkan kemandirian ekonomi desa dan mendorong berkembangnya unit usaha produktif, Pemerintah Desa Tongke-Tongke memandang perlu untuk melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu bentuk penyertaan modal tersebut diwujudkan dalam program pengembangan usaha peternakan ayam petelur yang dikelola langsung oleh BUMDes. Penyertaan modal ini tidak berbentuk uang tunai, melainkan berupa barang modal produktif yang terdiri dari ayam petelur siap produksi (*pullet*), kandang, peralatan pendukung, pakan awal, dan obat-obatan. Melalui skema ini, seluruh barang yang diberikan menjadi aset BUMDes yang dikelola secara profesional untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian, bahwa Pemerintah Desa Tongke-Tongke telah menyertakan modal sebanyak Rp. 192.342.400 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) itu tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Tongke-Tongke Nomor: 19 Tahun 2025 dan telah mengadakan ayam petelur sebanyak 1.000 ekor, selain daripada itu yang tertuang dalam Surat Keputusan tersebut bahwa Program ini bertujuan untuk ketahanan pangan desa dalam rangka mendukung swasembada pangan, meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Masyarakat.

Pengawasan dan Pemeliharaan Ayam Petelur BUMDes Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur



### **Gambar 7. Pengawasan dan Pemantauan Ayam Petelur oleh Kepala Desa dan Babinsa**



**Gambar 8. Pemeliharaan Ayam Petelur Oleh Anggota BUMDes**

Dengan adanya penyertaan modal ayam petelur ini, Pemerintah Desa Tongke-Tongke berharap BUMDes dapat mengelola usaha secara berkelanjutan, menerapkan prinsip manajemen yang transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

#### **D. Peternakan Sapi**

Pemerintah Desa Tongke-Tonke memandang perlu adanya terobosan usaha produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Salah satu program yang dikembangkan adalah usaha peternakan sapi dengan sistem bagi hasil, di mana modal awal disediakan oleh desa melalui alokasi anggaran APBDes, dan pengelolaan dilakukan bersama Masyarakat. Program ini memanfaatkan potensi desa yang memiliki ketersediaan lahan penggembalaan, sumber pakan hijauan yang melimpah, serta tenaga kerja lokal yang siap diberdayakan. Melalui skema ini, desa menyediakan sapi bakalan atau indukan, kandang, pakan awal, dan kebutuhan pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa menurut Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tongke-Tongke Nomor: 6 Tahun 2024 tentang Mitra pengelola, yang berasal dari warga, bertugas memelihara sapi hingga masa panen atau penjualan. Hasil penjualan sapi, dibagi sesuai kesepakatan yang telah diatur dalam perjanjian kerja sama dengan sistem bagi hasil yang diterapkan adalah 60% untuk desa dan 40% untuk mitra pengelola dalam hal ini peternak.

Peternakan Sapi Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur



**Gambar 8. Salah Satu Sapi Peliharaan Desa Tongke-Tongke yang dipelihara Warga**



**Gambar 8. Pemantauan Sapi Peliharaan oleh Sekretaris Desa**

Selain memberikan keuntungan finansial bagi desa, program ini juga memberikan dampak sosial yang signifikan, seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan beternak masyarakat, mengurangi urbanisasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, program peternakan sapi sistem bagi hasil ini diharapkan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian desa sekaligus sumber PADes yang berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Inovasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur cukup inovatif karena dalam perjalanan perodesasi Kepala Desa telah merumuskan kebijakan diantaranya; Berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Desa Nomor: 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan tambatan perahu di tiga titik yaitu Tambatan Perahu Dusun Cempae, Tambatan

Perahu Dusun Babana dan Tambatan Perahu Dusun Maroanging, Pembangunan Tambatan Perahu tersebut sementara dalam tahap sosialisasi sistem retribusi perahu; Pengelolaan sampah yang juga dalam tahap sosialisasi Peraturan Desa Nomor: 02 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah dan retribusi; Penyertaan Modal Ayam Petelur yang dikelola oleh BUMDes Tongke-Tongke sebanyak Rp. 192.342.400,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) itu tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Tongke-Tongke Nomor: 19 Tahun 2025 dan telah mengadakan ayam petelur sebanyak 1.000 ekor; Peternakan Sapi yang dipelihara oleh warga yang selanjutnya sistem bagi hasil pemerintah desa 60% dan Warga 40%. Berdasarkan inovasi kebijakan tersebut Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur yang dulunya di tahun 2022 dan 2023 Pendapatan Asli Desa (PADes) tidak ada sama sekali, dengan adanya kebijakan tersebut Pendapatan Asli Desa Tongke-Tongke sudah ada sebesar Rp. 881.000,-. Meskipun relatif rendah tetapi masih punya peluang untuk meningkat karena beberapa inovasi kebijakan tersebut sifatnya berkelanjutan. Meskipun demikian, program ini masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu mendapat perhatian, seperti keterbatasan modal operasional lanjutan, risiko teknis dalam pelaksanaan, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. Tantangan tersebut menjadi faktor penghambat yang harus diantisipasi untuk menghindari penurunan kinerja di masa mendatang.

Ke depan, program ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih luas dengan memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan kapasitas produksi, serta melakukan inovasi pada metode pengelolaan. Penguatan kemitraan dengan pihak eksternal, penerapan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menjadi langkah strategis yang dapat memperkuat keberlanjutan dan daya saing program di masa yang akan datang.

## REFERENSI

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Eko, S. (2015). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Kusnadi, M. (2019). Strategi Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(3), 88–96.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulgan, G., & Albury, D. (2003). *Innovation in the Public Sector*. London: Strategy Unit, Cabinet Office.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Osborne, D., & Brown, K. (2005). *Managing Change and Innovation in Public Service Organizations*. London: Routledge.
- Prabowo, A., & Putra, Y. M. (2020). Optimalisasi Potensi Lokal melalui Inovasi Kebijakan Desa. *Jurnal Pembangunan dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), 123–137.

- Prasetyo, E. (2019). “Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Meningkatkan Kemandirian Fiskal Desa.” *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 5(1), 45–56.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Sari, D. K., & Wijayanti, T. W. (2021). Inovasi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui BUMDes. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 45–58.
- Sugiarto, E. (2018). “Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Melalui Pengembangan BUMDes”. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 123–132.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2015). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat: Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Supriadi, D. (2021). “Peran Kepala Desa dalam Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik di Desa.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(2), 221–236.
- Wahyudi, A. (2022). Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 25–39.
- Winoto, T. (2020). “Strategi Peningkatan PADes Melalui Inovasi Kebijakan Ekonomi Lokal di Era Digital.” *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 33–45.